

# PELAYANAN TRANSPORTASI LAUT DI PULAU PANJANG KOTA BATAM DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE

**Neli Rosnida**

(email : [nellyrosnida@gmail.com](mailto:nellyrosnida@gmail.com))

**Dian Prima Safitri, S.AP.,MPA**

([dianprima2000@gmail.com](mailto:dianprima2000@gmail.com))

**Edison, S.AP., MPA**

(email : [edison4086@gmail.com](mailto:edison4086@gmail.com))

## Abstrak

Masalah dari transportasi laut di Pulau Panjang Kota Batam yaitu kurang layak sarana transportasi laut tersebut seperti kurangnya pelampung keselamatan, kapasitas penumpang yang berlebihan, serta belum adanya asuransi keselamatan penumpang sehingga sangat mengancam keselamatan penumpang dan meresahkan hati orang tua yang anaknya bersekolah di seberang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan transportasi laut di Pulau Panjang Kota Batam dalam kerangka *Governance*, serta untuk mengetahui karakteristik pemerintahan yang baik dalam pelayanan transportasi laut di Pulau Panjang dalam kerangka *good governance*.

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, kemudian dianalisis dengan secara kualitatif yaitu dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Lokasi Penelitian di Pulau Panjang Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang Kota Batam. Informan penelitian berjumlah 9 orang dan 1 orang sebagai key informan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Good Governance*, yaitu Pemerintah Masyarakat, dan pihak swasta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan transportasi laut di Pulau Panjang bergerak karena adanya interaksi dari ketiga aktor yang terlibat pertama, pemerintah yaitu Dinas Perhubungan yang menyediakan alat-alat keselamatan dan Dinas Pendidikan sebagai aktor yang terlibat dalam pemberian bantuan biaya transportasi siswa Pulau Panjang yang merupakan penumpang utama transportasi tersebut. Kedua, pihak swasta yaitu pemilik transportasi laut yang menyediakan transportasi laut tersebut. Ketiga, masyarakat Pulau Panjang selaku penumpang dan penikmat jasa transportasi laut tersebut. Jika dilihat dari prinsip *good governance* responsivitas pemerintahnya memang sudah ada namun tidak berkelanjutan dan tidak ada pengawasan dari pihak pemerintah dan partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah sehingga aspirasi-aspirasi mereka tidak disampaikan kepada pemerintah serta sarana transportasi yang dimiliki pihak swasta juga belum efektif dan efisien untuk dijadikan sarana transportasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa interaksi dari ketiga aktor yang terlibat dalam pelayanan transportasi laut di Pulau Panjang belum berjalan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga transportasi laut tersebut tidak layak dijadikan transportasi masyarakat karena mengancam keselamatan penumpang atau penikmat jasa transportasi laut tersebut. Saran dari penelitian ini perlu adanya survey dan pengawasan dari pihak pemerintah sehingga mengetahui kondisi transportasi masyarakat di Pulau Panjang.

**Kata Kunci : Pelayanan Publik, Transportasi, Governance**

### *Abstrak*

*The problem of sea transportation in Pulau Panjang City of Batam is less like the sea transportation such as lack of safety buoy, excessive passenger capacity, and the absence of passenger safety insurance so it is very threatening to the safety of passengers and disturb the hearts of parents whose children attend school across. The purpose of this research is to know sea transportation service in Pulau Panjang City of Batam within Governance framework, and to know good governance characteristic in sea transportation service in Pulau Panjang in the framework of good governance.*

*The type of research used is qualitative descriptive, then analyzed by qualitative with data reduction analysis techniques, data presentation, and conclusion (verification). Research Sites in Pulau Panjang Kelurahan sijantung Kecamatan Galang Batam City. Informant of the study amounted to 9 people and 1 person as key informant. The theory used in this research is the theory of Good Governance, the Government Society, and the private sector.*

*The results of this study indicate that sea transportation services in Pulau Panjang move because of the interaction of the three actors who first involved, the government is the Department of Transportation that provides safety tools and the Office of Education as an actor involved in providing transportation assistance for students of Pulau Panjang which is a passenger Main transport. Secondly, the private sector is the owner of sea transportation that provides the sea transportation. Third, the long island community as a passenger and connoisseurs of sea transportation services. When viewed from the principle of good governance, the government's responsiveness is already existing but not sustainable and there is no supervision from the government and the participation of the community is still very low so that their aspirations are not submitted to the government and the means of transportation owned by private parties is also not effective and efficient to Used as a means of public transportation. Conclusion from this research that interaction of three actors involved in sea transportation service in Long Island has not run according to good governance governance so that sea transportation is not suitable for public transportation because it threatens the safety of passengers or connoisseurs of sea transportation services. Suggestions from this research need to be survey and supervision from government side to know condition of public transportation in Pulau Panjang.*

***Keywords: Public Service, Transportation, Governance***

## PENDAHULUAN

Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara atas barang publik dan jasa publik.

Mewujudkan kesejahteraan warga negara adalah tujuan dari didirikan suatu pemerintahan, dalam hal hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara dibutuhkan kerjasama dan interaksi dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta atau prinsip *governance*. *Governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui intraksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan transportasi masyarakat. Hal ini menuntut penyedia jasa transportasi, pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga memberikan kepuasan, nyaman, dan jaminan keselamatan bagi pengguna jasa transportasi

tersebut. Secara umum transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi sendiri dibagi menjadi tiga yaitu, transportasi darat, laut, dan udara.

pulau panjang merupakan pulau yang terletak di Kota Batam Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang, Pulau Panjang memiliki jumlah penduduk sebanyak 278 kepala keluarga dengan mayoritas mata pencarian penduduknya nelayan. Pulau tersebut merupakan pulau kecil yang ada di Kota Batam, transportasi laut sangat menunjang aktivitas masyarakat Pulau Panjang seperti dalam bidang perekonomian dan bidang pendidikan.

Transportasi laut di Pulau Panjang disediakan oleh pihak swasta yaitu salah satu masyarakat Pulau Panjang yang berbentuk kapal kayu dengan ukuran 12meter x 2meter dengan biaya Rp. 5.000 / siswa dan Rp. 8.000 untuk penumpang umum. Setiap harinya kapal penyeberangan tersebut mengangkut siswa yang bersekolah karena siswa merupakan penumpang yang berdominan lebih banyak, selain mengangkut siswa kapal penyeberangan tersebut juga mengangkut penumpang umum serta barang sandang dan pangan yang di angkut dari Kota Batam. tujuan kapal penyeberangan tersebut ke pulau yang satu daratan dengan kota yaitu Pulau Galang dengan jarak tempuh 30 menit jika cuaca dalam keadaan baik. Ukuran

kapal penyeberangan ini seharusnya hanya bisa menampung 25 orang penumpang saja, sedangkan sisa dari pulau Panjang sekitar 50 orang siswa ditambah lagi dengan penumpang umum. Hal ini menyebabkan mereka harus bersempitan karena ukuran pompong yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang.

Pelayanan transportasi laut di Pulau Panjang juga ada interaksi dari pemerintah yaitu dinas perhubungan Kota Batam yang memberikan alat-alat keselamatan berupa pelampung keselamatan, karena penumpang transportasi tersebut berdominan siswa yang bersekolah di seberang maka dinas pendidikan Kota Batam juga memberikan bantuan kepada siswa hinterland di Kota Batam termasuk siswa dari Pulau Panjang. Namun transportasi laut di Pulau Panjang dikategorikan kurang layak karena ukuran dan kondisi pompong yang tidak sebanding dengan banyaknya penumpang sehingga selalu terjadi kepenuhan penumpang, kurangnya alat-alat keselamatan atau pelampung keselamatan serta belum adanya asuransi keselamatan penumpang.

Keterbatasan dan kelangkaan alat transportasi tersebut menyebabkan keresahan hati penumpang dan orang tua yang anak-anaknya bersekolah di seberang, ditambah lagi belum adanya asuransi jiwa dari pemerintah untuk menjamin keselamatan siswa yang menyeberang. Adapun musim angin kencang yang harus di hadapi penumpang yaitu :

1. Angin utara, bulan Januari dan Februari
2. Angin selatan, bulan Juni, Agustus, dan September
3. Angin barat, bulan Oktober, November, dan Desember

Transportasi laut di Pulau Panjang dikategorikan kurang layak karena alasan sebagai berikut :

1. Ukuran dan kondisi kapal yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penumpang, sehingga selalu *overload*.
2. Kurangnya alat pengamanan atau pelampung
3. Belum adanya asuransi keselamatan penumpang

Dalam mencapai tujuan pelayanan dan good governance yang diharapkan masyarakat, pemerintah seharusnya merespon masalah ini, karena transportasi merupakan salah satu bidang yang ada dalam pelayanan publik. Apalagi transportasi yang berhubungan dengan pendidikan yang juga merupakan salah satu bidang pelayanan publik yang harus dilayani pemerintah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian terhadap penyediaan transportasi laut Pulau Panjang Kota Batam karena kurang efektifnya transportasi yang dimiliki masyarakat pulau Panjang untuk penyeberangan, oleh karena itu penulis mengambil judul :

## “Pelayanan Transportasi Laut di Pulau Panjang Kota Batam Dalam Kerangka *Good Governance*”

### LANDASAN TEORITIS

*Governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana para warga masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, memediasi berbagai perbedaan-perbedaannya, dan menjalankan hak dan kewajibannya. Pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sementara sektor swasta memainkan perannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan, dan pendapatan, sedangkan masyarakat madani (*civil society*) menyelenggarakan interaksi sosial dalam politik secara sehat. Pendek kata, esensi dari paradigma ini adalah memperkuat interaksi antara ketiga aktor tersebut dalam mempromosikan *people-centered development* (Cheema, 2007 : 34-35).

Aktor-aktor *Good Governance* menurut *World Conference on Governance*, UNDP (1999) ( dalam Sedarmayanti, 2009: 278) antara lain :

1. Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat

madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi didalam pasar dapat dihindari. Negara sebagai salah satu unsur *governance*, didalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi didalam pasar dapat dihindari.

2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengelolaan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

*Good Governance* memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor diatas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *Good Governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk dipusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada dimasyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan

keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kepemerintahan yang baik menurut UNDP (1997) dalam Sedarmayanti (2013: 282) mengidentifikasikan lima karakteristik yaitu :

- a. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial dan politik.
- b. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
- c. Proses penguatan sendiri. Sistem pengelolaan mandiri adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberi kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek pemerintahan yang baik.
- d. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni dan kerjasama untuk pertumbuhan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
- e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar dan masyarakat madani.

Lima karakteristik *good governance* mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang melibatkan *stakeholders* dengan menerapkan prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003) mengungkapkan prinsip-prinsip *good governance* antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing.

Dewasa ini, *governance* mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai negara melalui ajakan UNDP dengan menggunakan istilah “*good governance*”. Adapun karakteristik *good governance* dari UNDP (dalam Keban 2014 : 38-39) meliputi :

1. *Participation* yaitu bahwa semua orang harus diberi kesempatan untuk bersuara dalam mengambil keputusan baik langsung atau melalui institusi perantara yang mewakili kepentingannya.
2. *Rule of law* yaitu bahwa aturan hukum harus adil dan ditegakan tanpa pandang bulu, termasuk hukum yang mengatur hak-hak asasi manusia.
3. *Transparency* yaitu bahwa keterbukaan harus dibangun diatas aliran informasi yang bebas. Berbagai proses, institusi dan informasi harus dapat diakses oleh semua orang yang berkepentingan.

4. *Responsiveness* yaitu bahwa institusi-institusi dan proses yang ada harus diarahkan untuk melayani para pemangku kepentingan atau *stakeholder*.
5. *Consensus orientation* yaitu bahwa harus ada proses mediasi untuk sampai kepada consensus umum yang didasarkan atas kepentingan kelompok, dan sedapat mungkin didasarkan pada kebijakan dan prosedur.
6. *Equity* yaitu bahwa semua orang (baik laki-laki maupun perempuan) memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya.
7. *Effectiveness and efficiency* yaitu bahwa proses dan institusi-institusi yang ada sedapat mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan terbaik (best use) terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada.
8. *Accountability* yaitu bahwa para pengambil keputusan di instansi pemerintah, sector publik dan organisasi masyarakat madani (civil society) harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan diputuskannya kepada publik sekaligus kepada pemangku kepentingan.
9. *Strategic vision* yaitu bahwa para pemimpin dan masyarakat publik harus memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang terhadap pembangunan manusia, dengan memperhatikan latarbelakang

sejarah, dan kompleksitas sosial dan budaya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang hanya memaparkan dari hasil wawancara secara ilmiah dan suatu gejala-gejala yang ada dengan apa adanya pada saat sekarang. Menurut Sugiyono (2007 : 15) bahwa “data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran.” Dari data yang telah terkumpul sesuai dengan indikator permasalahan peneliti mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul tersebut menjadi data yang sistematis, teratur dan terstruktur sehingga mempunyai makna sesuai permasalahan yang berkaitan dengan Pelayanan Transportasi Laut di Pulau Panjang Kota Batam Dalam Kerangka *Good Governance*.

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Analisis Data Pelayanan Transportasi Laut di Pulau Panjang Kota Batam Dalam Kerangka Governance**

Hasil wawancara peneliti oleh responden dengan melihat pelayanan transportasi laut di Pulau Panjang dalam kerangka governance. Good governance sektor publik merupakan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders*, berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut Prinsip

Responsivitas pemerintah, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi sarana transportasi laut di Pulau Panjang Kota Batam. Good governance digerakan oleh tiga domain yaitu state (negara/pemerintahan), private sector (sektor swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat).

### **1. Pemerintah (dishub dan disdik Kota Batam)**

Transportasi Laut di Pulau Panjang tersedia karena kesulitan masyarakat akan sarana transportasi yang memudahkan mereka berpergian, sehingga terbentuklah transportasi sederhana yang dikelola salah satu masyarakat Pulau Panjang (sektor swasta). Transportasi tersebut sebenarnya belum layak disebut transportasi untuk mengangkut orang, selain kondisi kapal penyeberangan yang sudah tua transportasi tersebut juga memiliki ukuran yang kecil sehingga tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang beraktivitas setiap harinya. Oleh karena itu, peran dan respon pemerintah sangat diharapkan karena transportasi merupakan salah satu bidang pelayanan publik yang seharusnya disediakan oleh pemerintah.

Dinas Perhubungan merupakan salah satu pemerintah yang terlibat dalam pelayanan transportasi laut di Pulau Panjang, sejak tahun 2011 pihak dishub memberikan bantuan berupa alat-alat keselamatan yaitu pelampung keselamatan sebanyak 38 buah pelampung. Selain dishub, dinas pendidikan Kota Batam juga ikut terlibat dalam pelayanan transportasi laut di Pulau Panjang karena penumpang yang menumpang

transportasi laut tersebut berdominan siswa sehingga pihak disdik Kota Batam memberikan bantuan berupa biaya transportasi siswa yang menyeberang.

Dalam pemerintahan yang baik pemerintah perlu menerapkan prinsip responsivitas atau daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. berikut prinsip responsivitas pemerintah dalam menanggapi masalah transportasi laut di Pulau Panjang Kota Batam.

Pelayanan transportasi laut di Pulau Panjang dinas perhubungan Kota Batam berperan dalam penyediaan alat-alat keselamatan seperti pelampung keselamatan. Menurut hasil wawancara kepada Kabid Laut Dishub Kota Batam mereka setiap tahunnya memberikan bantuan alat-alat keselamatan kepada pemilik jasa transportasi masyarakat antar pulau namun pada kenyataannya menurut pemilik transportasi laut di Pulau Panjang mereka baru mendapatkan bantuan alat keselamatan berupa pelampung keselamatan setelah 10 tahun bergeraknya transportasi laut tersebut yaitu pada tahun 2011 sebanyak 38 buah pelampung.

Dinas pendidikan juga berperan dalam pelayanan transportasi laut di Pulau Panjang hal ini dikarenakan banyaknya penumpang siswa yang bersekolah di Galang, sehingga disdik Kota Batam memberikan bantuan berupa biaya transportasi laut siswa hinterland termasuk siswa dari Pulau Panjang. Dana bantuan tersebut diberikan kepada pihak sekolah untuk diberikan kepada pemilik transportasi laut tersebut, biaya yang diberikan



oleh dinas perhubungan sekitar Rp. 3.000 / siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat mengenai bantuan biaya transportasi siswa Pulau Panjang yang menyeberang memang sudah mendapat respon dari pemerintah kota Batam, namun pada kenyataannya bantuan tersebut sering terkendala di waktu pencairan dana sehingga pihak sekolah sering menunggak kepada pemilik transportasi sampai biaya tersebut keluar. Dalam hal ini seharusnya bantuan tersebut membantu masyarakat yang anaknya bersekolah di seberang namun kenyataannya menyulitkan pemilik transportasi, seharusnya pemerintah menyalurkan dana bantuan tersebut / bulan sehingga tidak menyulitkan pihak-pihak yang terlibat seperti siswa dan pemilik transportasi laut.

## **2. Masyarakat (penumpang transportasi Laut di Pulau panjang)**

Membangun *Good Governance*, bukan hanya masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, kondisi pelaku dalam masyarakat juga harus mendapat perhatian. Dalam pencapaian pemerintahan yang baik interaksi dari masyarakat juga dibutuhkan karena semua yang dicantumkan dalam perencanaan strategis pada dasarnya mengarah kemasyarakat yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. oleh karena itu, prinsip partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam *Good Governance*.

Menurut tokoh masyarakat Pulau Panjang selama ini memang masyarakat belum pernah mengajukan permohonan bantuan secara resmi kepada pihak pemerintah dikarenakan banyak pihak-pihak yang tidak menginginkan hal itu karena mereka takut mata pencarian mereka terganggu padahal harapan dari masyarakat memang sangat ingin transportasi laut yang lebih layak sehingga perjalanan mereka aman dan nyaman. Padahal harapan-harapan masyarakat sangat berharap akan tersedianya transportasi laut yang lebih layak sehingga menjamin keselamatan mereka ketika berpergian.

## **3. Pihak Swasta ( Pemilik transportasi laut)**

Transportasi masyarakat Pulau Panjang dikelola oleh pihak swasta, terbentuknya transportasi tersebut berawal dari keinginan masyarakat untuk berpergian dan memenuhi aktivitas ekonomi dan pendidikannya. dalam penelitian ini peneliti melihat dari prinsip Efektivitas dan Efisiensi sarana transportasi yang dimiliki pihak swasta tersebut sehingga bisa melihat interaksi dari 3 domain (kerangka) yang berinteraksi dalam *Good Governance*.

Ukuran kapal penyeberangan yang dimiliki pihak swasta 12meter x 2meter dengan biaya pp 5000 rupiah / siswa dan 8000 rupiah penumpang umum, di atas perahu itu mereka harus duduk merapat dan bersempitan karena ukuran pompong yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang. Ukuran perahu (pompong) ini seharusnya hanya bisa menampung 25 orang penumpang saja, sedangkan siswa dari

pulau panjang sebanyak 54 orang siswa ditambah lagi dengan penumpang umum. Sering kali penumpang yang menyebrang basah karna terpaan ombak, Jika cuaca sangat buruk mereka terpaksa tidak sekolah karena kapal penyebrangan tidak bisa memaksakan untuk menyebrang.

### **B. Karakteristik Kepemerintahan yang Baik Dalam Penyediaan Transportasi Laut di Pulau Panjang Dalam Kerangka Governance.**

Kepemerintahan yang baik, menurut UNDP (1997) (dalam Sedarmayanti 2013: 282) mengidentifikasi lima karakteristik:

1. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar : pemerintah (dishub Kota Batam, disdik Kota Batam), sektor swasta (pemilik transportasi laut di Pulau panjang), dan masyarakat madani (masyarakat Pulau Panjang/penumpang transportasi laut). ketiga aktor tersebut terlibat dalam pelayanan transportasi laut di Pulau Panjang, dishub Kota Batam memberikan bantuan berupa penyediaan alat-alat keselamatan penumpang seperti pelampung keselamatan dan disdik Kota batam menyalurkan dana dari Pemko Batam untuk diberikan bantuan biaya transportasi laut siswa hinterland termasuk siswa Pulau panjang yang menyeberang untuk pergi kesekolah, pihak swasta menyediakan sarana transportasi laut di Pulau Panjang karena permintaan masyarakat Pulau Panjang, dan masyarakat sebagai aktor yang berkepentingan

yang menggunakan jasa transportasi laut tersebut. Berdasarkan wawancara dan observasi dilapangan interaksi ketiga aktor tersebut belum cukup maksimal karena kondisi sarana transportasi di Pulau Panjang belum memenuhi standar

2. Komunikasi, berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan komunikasi dari ketiga aktor yang terlibat dalam transportasi laut di Pulau Panjang masih rendah karena pihak penyedia transportasi dan masyarakat tidak menyampaikan ke pihak pemerintah akan kebutuhan transportasi masyarakat yang lebih layak serta kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah sehingga komunikasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya/kurangnya komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta yang menyediakan transportasi laut di Pulau Panjang.<sup>3</sup>
3. Proses penguatan sendiri. Transportasi laut di Pulau panjang terbentuk karena kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang memudahkan mereka berpergian dan beraktivitas sehingga salah satu masrakat menyediakan sarana ttransportasi tersebut dengan seadanya. Namun, transportasi yang disediakan oleh pihak swasta itu belum memenuhi standar kelayakan kapal penyeberangan seperti yang dikatakan kabit laut dishub Kota Batam bahwa kapal penyeberangan di Pulau Panjang sebenarnya bukan kapal angkut penumpang atau

- orang melainkan kapal angkut barang sehingga belum memenuhi persyaratan kapal penyeberangan.
4. Teknologi transportasi laut di Pulau Panjang belum mengikuti perkembangan zaman karena transportasi tersebut seharusnya bukan untuk penumpang melainkan untuk angkutan barang. Seharusnya sekarang sudah ada teknologi khusus kapal pengangkut penumpang sesuai standar kelayakan kapal yang menjamin kenyamanan dan keamanan penumpang.
  5. Masyarakat Pulau panjang sangat bergantung dengan pihak penyedia jasa transportasi karena jika tidak ada transportasi laut disana sangat menghambat kehidupan mereka karena menyulitkan masyarakat untuk berpergian serta memperoleh pendidikan. Namun pada kenyataannya pihak swasta/pemilik transportasi laut disana belum mampu untuk menyediakan transportasi yang aman dan nyaman dalam hal ini sangat memerlukan bantuan dari pihak pemerintah untuk lebih merespon dan membantu dalam penyediaan transportasi laut tersebut. Hal ini menyebabkan saling ketergantungan antara pemerintah, pihak swasta pemilik transportasi, dan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi tersebut.

## **KESIMPULAN**

### **1. Analisis Pelayanan Transportasi Laut di Pulau Panjang Dalam Kerangka *Governance***

Pelayana Trasnportasi Laut di Pulau panjang Kota Batam bergerak karena adanya interaksi dari masyarakat, pihak swasta dan pemerintah atau inberdasarkan kerangka *Good Governane*. Berikut domain yang terlibat dalam pelayanan transportasi laut di Pulau panjang, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Pemerintah

Melihat dari hasil wawancara dan observasi pemerintah sudah merespon atau membantu penyediaan alat-alat keselamatan seperti pelampung keselamatan, walaupun jumlah pelampung itu kurang dari jumlah penumpang setidaknya pemerintah sudah membantu dalam hal keselamatan.

Dinas Pendidikan Kota Batam juga ikut memberikan bantuan berupa biaya transportasi kepada siswa hinterland termasuk siswa dari Pulau panjang. Walaupun biaya tersebut hanya diberikan sebagian siswa Pulau Panjang saja masyarakat yang kurang mampu sangat terbantu.

#### 2) Masyarakat

Melihat hasil dari wawancara masyarakat kurang berpartisipasi padahal tersedianya transportasi yang layak merupakan harapan merka, namun aspirasi mreka tidak disampaikan kepada pemerintah disebabkan ada pihak-pihak yang mersa dirugikan jika tersedianya transportasi dari pemerintah.

3) Pihak Swasta (Pemilik Transportasi)

Pihak swasta penyedia jasa transportasi laut di Pulau Panjang belum cukup mampu untuk menyediakan sarana transportasi sesuai standar kelayakan transportasi penumpang. Namun, karena takut pemerintah mengambil alih mata pencariannya mereka tidak mempedulikan keselamatan penumpang. Jika dilihat dari prinsip efektivitas dan efisiensi pemerintahan yang baik sarana transportasi laut tersebut tidak efektif dan efisien untuk dijadikan transportasi penumpang.

Wujud *Good Governance* penyelenggaraan pemerintah negara yang solit, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat Interaksi dari ketiga pihak tersebut belum berjalan dengan semestinya karena melihat dari kondisi transportasi yang kurang layak sehingga mengancam keselamatan penumpang.

**2. Karakteristik Pemerintahan yang Baik Dalam Penyediaan Transportasi Laut di Pulau Panjang Dalam Kerangka *Governance*.**

a. Interaksi, interaksi dari ketiga aktor yang terlibat belum cukup maksimal karena peran pemerintah terutama dishub masih kurang dan belum berjalan secara

berkelanjutan serta partisipasi masyarakatnya juga belum ada.

- b. Komunikasi, dilihat dari belum maksimalnya interaksi dari ketiga aktor yang terlibat dalam pelayanan transportasi laut di Pulau Panjang bisa dipastikan bahwa komunikasi dari ketiga aktor tersebut belum berjalan dengan semestinya karena kurang pengetahuannya pemerintah dengan kondisi transportasi laut di Pulau Panjang serta partisipasi masyarakatnya juga masih rendah sehingga komunikasinya tidak berjalan sesuai yang dimaksud dalam pemerintahan yang baik
- c. Proses penguatan sendiri tanpa pengawasan dari pihak pemerintah yang kemudian membuat belum layaknya standar transportasi laut yang dimiliki oleh pihak swasta.
- d. Teknologi yang digunakan dalam penyediaan transportasi laut di Pulau Panjang masih sangat sederhana sehingga belum sesuai dengan standar kelayakan kapal penyeberangan penumpang pada umumnya.
- e. Masyarakat pulau panjang sangat ketergantungan dengan pihak swasta, karena kurang maksimalnya respon atau bantuan yang diberikan pemerintah padahal masyarakat sangat membutuhkan respon yang lebih dari pihak pemerintah.

## **SARAN**

### **1. Pemerintah**

Pemerintah seharusnya mensurvei lokasi yang akan mereka bantu sehingga mengetahui kondisi tempat yang memerlukan bantuan dan apasaja yang mereka butuhkan serta mengawasi secara berkelanjutan pelayanan transportasi yang disediakan pihak swasta. Dalam hal transportasi laut di Pulau Panjang diharapkan pihak pemerintah menambah pelampung keselamatan karena pelampung tersebut hanya berjumlah 38 buah pelampung semntara penumpang setiap harinya berjumlah sekitar 50 orang penumpang, sehingga perlu adanta tambahan pelampung sekitar 30 buah pelampung lagi. Pemerintah juga seharusnya memeriksa kelengkapan surat izin pemilik pompong dan standar kelayakan pompong supaya tau dengan jelas apakah transportasi tersebut layak untuk mengangkut masyarakat sesuai dengan standar kelayakan kapal penyeberangan.

### **2. Masyarakat**

Partisipasi masyarakat diharapkan disampaikan kepemerintah dengan melibatkan perangkat desa sebagai salah satu jalur untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. karena pemerintahan yang baik

terbentuk karena adanya partisipasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil keputusan atas hak-hak dan kebutuhan masyarakat tersebut.

### **3. Pihak Swasta (Pemilik Transportasi)**

Demi keselamatan dan kenyamanan penumpang pemilik kapal seharusnya memperbaiki kondisi kapal yang kurang layak karena seperti yang kita ketahui kapal selalu kelebihan muatan karena ukuran kapal yang tidak sesuai dengan banyaknya jumlah penumpang. Diharapkan pemilik transportasi memikirkan lagi keselamatan penumpangnya karena sangat berbahaya membawa penumpang dengan jumlah yang melebihi kapasitas pompong apalagi disaat angin kencang.

Jika pihak swasta tidak mampu menyediakan transportasi yang lebih layak seharusnya mengajukan bantuan kepada pihak pemerintah yang merupakan salah satu aktir yang terlibat untuk memenuhi pelayana transportasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Miro, Fidel. 2012. *Pengantar Sistem Transportasi*. Jakarta: Erlangga.
- Nasution. 2008. *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salim, Abas. 2006. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Serdamayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi publik Kontemporer*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Mole, Elsi. 2016. *Kualitas Pelayanan Publik (Studi kasus Pelayanan di Unit Usaha Transportasi Laut PD.Panca Karya Ambon)*
- Aji, Setio. 2015. *Kualitas Pelayanan Transportasi Publik (Studi Deskriptif tentang Kualitas Pelayanan Kapal Penumpang Trayek Gresik-Bawean di Pelabuhan Gresik)*.
- Putra, Andi Anggara Pratama. 2014. *Pelayanan Transportasi Laut di Pelabuhan Penyeberangan Pammatata Kabupaten Kepulauan Selayar*.

### B. Dokumen

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan.
- Badan Pusat Statistik Kota Batam, Batam Dalam Angka 2015.

### A. Jurnal dan Skripsi